



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 06/PMK.01/2007 tentang
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada
Pengadilan Pajak

**Formulir
Permohonan Baru**

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Gedung D Lantai V Departemen Keuangan
Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Warganegara :
Pendidikan Terakhir :
No. Kartu Tanda Penduduk :
Alamat Rumah dan :
Nomor Telp :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ini mengajukan permohonan ijin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Untuk
melengkapai permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut :

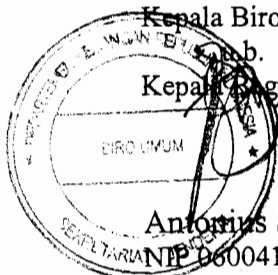
1. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
3. Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir;
4. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang ;
5. Fotocopy NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
6. Asli SKKB dari POLRI atau instansi yang berwenang ;
7. Pas Photo terakhir pemohon berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
8. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 4, yaitu:
 - a. Fotokopi Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak atau Ijazah/Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dari lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku yang telah dilegalisir untuk yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak ; dan atau
 - c. Fotokopi Sertifikat Diploma III (tiga) pajak/kepabeanaan dan cukai/akuntansi atau yang dipersamakan dari lembaga yang terakreditasi dan diakui dalam menyelenggarakan pendidikan serupa yang telah dilegalisir.

Demikian disampaikan agar Bapak maklum.

.....
P e m o h o n ,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 06/PMK.01/2007 tentang
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada
Pengadilan Pajak

**FORMULIR
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap :
Tempat / tanggal lahir :
Alamat rumah :
.....
Nomor Kartu Tanda :
Penduduk WNI :
Pendidikan Formal : 1.
(cantumkan tahun lulus 2.
dan nama pendidikannya) 3.
4.
5.
6.
Pendidikan Konsultan Pajak :
.....
Pendidikan brevet / PPJK :
(Cantumkan jenis brevet/
sertifikat, nomor, bulan dan
tahun, serta lembaga yang
menerbitkan brevet/sertifikat)
.....
Pekerjaan :
.....
Pengalaman Kerja :
.....
.....
.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan akan saya/kami
pertanggungjawabkan apabila diperlukan.

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
Kepala Bagian T.U. Departemen
BIRO UMUM
Anthonis Suharto
NIP. 060041107

MENTERI KEUANGAN

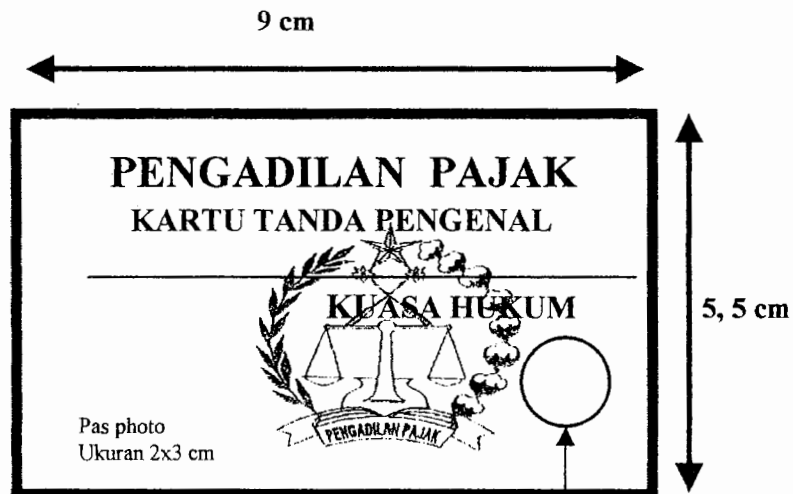
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

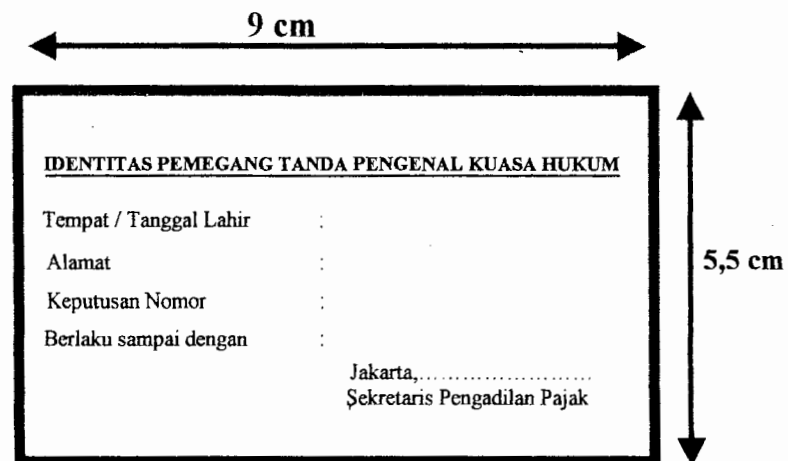
Tampak Depan
Kartu Tanda
Pengenal



Garis Tepi Kartu

Kode Huruf Abjad (A,B, atau C)
dicantumkan didalam lingkaran
disesuaikan dengan Brevet Pajak
yang dimilikinya

Tampak
Belakang Kartu



Garis Tepi Kartu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 06/PMK.01/2007 tentang
Peryaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada
Pengadilan Pajak

Keterangan Gambar Kartu Tanda Pengenal (Kartu):

- Pas photo : Ukuran 2 X 3 cm (hitam putih atau berwarna).
- Warna tulisan pada kartu : warna hitam.
- Alamat : Sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP pemohon.
- Keputusan Nomor : Diisi sesuai dengan nomor Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang berlaku.
- Berlaku sampai dengan : Diisi sesuai dengan jangka waktu masa berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku.
- Warna garis tepi kartu : 1. Kuning ; atau
2. Hijau
- Warna kuning garis tepi kartu : Menunjukkan identitas pemilik Kartua Tanda Pengenal kuasa hukum yang berlatarbelakang pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, tidak termasuk dibidang kepabeanan dan cukai, namun termasuk dibidang pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yanga berlaku
- Warna hijau garis tepi kartu : Menunjukkan identitas pemilik Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang berlatarbelakang pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai
- Ukuran kartu : Panjang 9 (sembilan) cm x lebar 5,5 (lima koma lima) cm
- Jenis kertas kartu : Kertas karton tebal
- Logo/lambang : Logo/lambang Pengadilan Pajak hanya tergambar ditengah permukaan Kartu Tanda Pengenal (tidak tergambar pada belakang Kartu Tanda Pengenal)
- Warna logo/lambang Pengadilan Pajak : 1. Warna kuning untuk Kartu Tanda Pengenal yang garis tepinya berwarna kuning ; atau
2. Warna hijau untuk Kartu Tanda Pengenal yang garis tepinya berwarna hijau

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

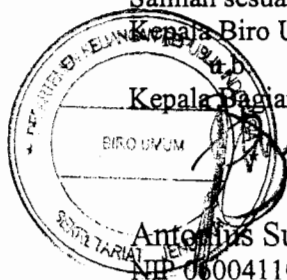
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP. 060041107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**Formulir
Permohonan
Perpanjangan**

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Gedung D Lantai V Departemen Keuangan
Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan perpanjangan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Warganegara :
Pendidikan Terakhir :
No. Kartu Tanda Penduduk :
Alamat Rumah dan :
Nomor Telp :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan ijin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup ;
2. Asli Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang terakhir ;
3. Asli Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang terakhir ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
5. Pasfoto terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar ;
6. Fotocopy NPWP yang telah dilegalisir, dan
7. Asli SKKB dari POLRI atau instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan agar Bapak maklum.

.....
P e m o h o n,

(.....)

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
a.b.
Kepala Bagian T.O. Departemen
Antonius Suharto
NIP 060041107